

## **BAB 1**

### **Latar Belakang**

Dalam era demokrasi, transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Saat ini, akuntabilitas sudah tidak bisa diabaikan lagi. Akuntabilitas kinerja pemerintah mulai mendapatkan perhatian khusus untuk peningkatan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* (UNDP, 1999). Selain itu, akuntabilitas merupakan bagian dari asas umum penyelenggaraan negara yang mencerminkan karakteristik dari sebuah *good governance* (UU No 32 Tahun 2004, 2004). Pada tahun 2010, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pedoman akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun secara periodik (Perpres RI No. 29 Tahun, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan pada sasaran yang telah direncanakan melalui suatu sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan, menurut Perpres RI No. 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah rangkaian yang sistematis yang dimana dilaksanakannya perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga pemanfaatan atas informasi kinerja yang diraih untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara aktual. Pembentukan sistem pertanggungjawaban ini tidak lepas dari tujuan utama pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau yang sering disebut dengan *good governance*. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terkait dalam penggunaan anggaran diwajibkan untuk dapat dilakukan pengukuran dan dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap kegiatan harus memiliki indikator yang jelas sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya bagi masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) terhadap aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan (Manullang & Abdullah, 2019). Akuntabilitas pemerintah daerah yang diwujudkan dalam SAKIP mempunyai manfaat serta peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Namun, pada praktiknya akuntabilitas kinerja belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Menurut data yang dipaparkan dalam Solopos.com (2020), pemerintah Sukoharjo menempati peringkat terendah dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Jawa Tengah selama dua tahun berturut-turut. Nilai SAKIP

Sukoharjo pada 2019 yakni 57,84 atau CC, sementara pada tahun 2018 yakni 57,01 atau CC. Kondisi ini berbeda dengan Wonogiri yang memperoleh nilai 70,43 atau BB pada 2018 dan 73,07 atau BB pada 2019. Sementara daerah lainnya seperti Kota Solo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Klaten memperoleh nilai B. Peringkat Sukoharjo dalam penilaian SAKIP berada di level paling bawah di Jawa Tengah.

Nilai CC mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja cukup (memadai) serta perlu banyak perbaikan tidak mendasar (Perwali Tahun 2017). Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo untuk memperbaiki kinerjanya. Menurut Alam et al., (2019) dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perlu adanya integritas dalam aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas merupakan kesatuan diri yang konsisten pada komitmen yang telah ditentukan oleh peraturan. Sedangkan, komitmen yang dimaksud mencerminkan prinsip, motivasi, keyakinan, perasaan, logika, tindakan dan regulasi (Ubaidillah & Arumsari, 2019). Seseorang yang mempunyai integritas yang tinggi maka orang tersebut semakin berkomitmen terhadap regulasi yang ada (Ardiani, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara yang mempunyai integritas tinggi akan menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan SAKIP, sehingga akuntabilitas kinerja akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2019) dan Manullang & Abdullah (2019) menunjukkan hasil bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Alam et al., 2019) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Selain itu, menurut Tiasari (2013) faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif dalam pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga terciptanya keefesienan terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan (Manullang & Abdullah, 2019). Sistem pengendalian internal terdiri dari komponen-komponen ataupun prosedur-prosedur yang dibuat sedemikian rupa demi tercapainya kondisi yang efektif, efisien dan relevan dalam sebuah organisasi demi keberlangsungan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Pada sistem pemerintahan, sebuah instansi pemerintah juga melaksanakan sistem pengendalian internal yang dimana hal ini menjadi kewajiban dan ketaatan suatu instansi atas kebijakan pemerintah. Peningkatan efisiensi terhadap anggaran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya akuntabilitas kinerja pada pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan indikator-indikator yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas instansi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Purbasari & Bawono (2017) dan Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ajhar dan Akram (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah adalah kepemimpinan. Menurut Martinis dan Maisah (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepala instansi (pimpinan instansi) harus memiliki kepemimpinan yang baik sehingga dapat mempengaruhi semangat kerja yang baik kepada bawahan serta mendorong SKPD dalam penyusunan dan pelaporan LAKIP untuk mewujudkan suatu akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik (Claura, 2019). Penelitian yang

dilakukan oleh Marlina et al., (2021) dan (Claura, 2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Rizal & Hermanto, 2019) menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh integritas, sistem pengendalian internal dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh integritas, sistem pengendalian internal dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2019) di Malaysia. Sedangkan, objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo. Alasan objek tersebut dipilih karena hasil peniaian SAKIP pemerintah kabupaten Sukoharjo mendapatkan peringkat terakhir atau berada di level paling bawah di Jawa Tengah selama 2 tahun berturut – turut. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius untuk diteliti.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
- b. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
- c. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?

### **1.2. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

- a. Pengaruh integritas terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- b. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- c. Pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

### **1.3. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

#### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh integritas, sistem pengendalian internal dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah daerah.

## **BAB 2**

### **Kajian Pustaka**

#### **2.1. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang mendeskripsikan suatu keadaan dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Konsep *stewardship* menganggap manajemen suatu perusahaan bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Hakekat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran menjadi dasar filosofi dibangunnya teori *stewardship* untuk kepentingan publik. Teori *stewardship* juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals (Arfiansyah, 2020). Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu pemerintah daerah bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (prinsipal). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

#### **2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014). Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjalankan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas kinerja tidak lepas dari sistem yang membentuknya. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah rangkaian yang sistematis yang dimana dilaksanakannya perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga pemanfaatan atas informasi kinerja yang diraih untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kata lain, sistem

akuntabilitas kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara aktual (Manullang & Abdullah, 2019). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terkait dalam penggunaan anggaran diwajibkan untuk dapat dilakukan pengukuran dan dinyatakan keterkaitannya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap kegiatan harus memiliki indikator yang jelas sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya bagi masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) terhadap aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan (Manullang & Abdullah, 2019).

### **2.3. Integritas**

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, sehingga integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Ardiani, 2019). Faktor pembentuk integritas yang menjadi landasan pengembang alat ukur integritas dalam penelitian berasal dari konsep yang dikemukakan oleh psikologi humanistic Rogers (1961) adalah :

#### **1. Jujur**

Individu dikatakan jujur apabila menerima dan mampu bertanggung jawab atas perasaan serta perilaku sebagaimana adanya. Meski memegang erat prinsip kejujuran, namun dalam situasi yang penuh tipu muslihat dan harus menghadapi orang yang tidak jujur individu yang memiliki integritas tinggi akan bertindak dan menegur dengan mempertimbangkan berbagai hal serta tidak menyakiti.

#### **2. Teguh**

Teguh artinya tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain.

#### **3. Memiliki *Self-Control* yang kuat**

*Self-control* didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengontrol atau memantau respon agar sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki. Untuk bisa memperlakukan orang lain, bahkan orang yang sesungguhnya tidak disukai secara baik, individu harus memiliki *self-control* yang kuat.

#### **4. Memiliki *self-esteem* yang tinggi**

*Self-esteem* adalah kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai dengan moral keyakinan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah, perlu adanya integritas dari aparatur negara dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas sebagai kesatuan diri yang merupakan konsisten pada komitmen yang telah ditentukan peraturan. Komitmen mencerminkan prinsip, motivasi, keyakinan, perasaan, logika, tindakan dan regulasi (Ubaidillah & Arumsari, 2019). Seseorang yang punya integritas yang tinggi maka orang tersebut semakin berkomitmen terhadap regulasi yang ada. (Ardiani, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi integritas aparat pemerintahan daerah maka akuntabilitas kinerja akan semakin tinggi.

### **2.4. Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern

(SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019). Sedangkan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Widyatama et al., 2022). Unsur sistem pengendalian meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

SPIP dirancang dalam rangka pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Arfiansyah, 2020). Para pimpinan pemerintahan diwajibkan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada pimpinan unit kerja terkecil tetapi masing-masing individu. Kehadiran sistem pengendalian bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku pemerintah daerah (Widyatama et al., 2022).

## **2.5. Kepemimpinan**

Menurut Marlina et al., (2021) pengertian kepemimpinan proses yang mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok agar upaya yang mereka tuju dapat tercapai. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2015). Menurut Yamin & Maisah (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dianggap sebagai bentuk kontrol terpusat dimana satu individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain, dengan kata lain kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan bawahannya agar mau melakukan tugas atau perintah sesuai dengan arahan pemimpinnya (Rizal & Hermanto, 2019). Pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi karena pemimpin merupakan titik puncak dari suatu organisasi yang akan memotivasi dan mengarahkan bawahannya untuk sesuai dengan tujuan organisasi. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjalankan pemerintahan dengan penuh demokrasi dan harus dapat menjalin kerja sama dan juga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pemerintahan.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

Alam et al. (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sektor publik di Malaysia. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sektor publik di Malaysia. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sektor publik di Malaysia.

Manullang & Abdullah (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa Pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pergantian kepala SKPD secara simultan dan bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. Pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. Pergantian kepala SKPD berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Claura (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Penghargaan dan Hukuman berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Ajhar & Akram (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis aktual, Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis aktual, dan kesiapan penerapan SAP berbasis aktual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Aziz et al. (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa integritas berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik. Pengendalian internal dan kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik.

## **2.7. Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1. Pengaruh Integritas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah, perlu adanya integritas dari aparatur negara dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas sebagai kesatuan diri yang merupakan konsisten pada komitmen yang telah ditentukan peraturan. Menurut Alam et al., (2019) dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perlu adanya integritas dalam aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas merupakan kesatuan diri yang konsisten pada komitmen yang telah ditentukan oleh peraturan. Sedangkan, komitmen yang dimaksud mencerminkan prinsip, motivasi, keyakinan, perasaan, logika, tindakan dan regulasi (Ubaidillah & Arumsari, 2019). Seseorang yang mempunyai integritas yang tinggi maka orang tersebut semakin berkomitmen terhadap regulasi yang ada (Ardiani, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara yang mempunyai integritas tinggi akan menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan SAKIP, sehingga akuntabilitas kinerja akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki integritas yang tinggi akan menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya, salah satu wujud menjaga amanah tersebut adalah

menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan SAKIP yang ditentukan. Dengan adanya SAKIP, pemerintah dituntut untuk melaporkan pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apabila pegawai melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan SAKIP maka hal ini tentunya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2019) dan Manullang & Abdullah (2019) menunjukkan hasil bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

**H1 : Integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

### **2.7.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengendalian internal yang efektif dalam pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga terciptanya keefesienan terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan (Manullang & Abdullah, 2019). Sistem pengendalian internal terdiri dari komponen-komponen ataupun prosedur-prosedur yang dibuat sedemikian rupa demi tercapainya kondisi yang efektif, efisien dan relevan dalam sebuah organisasi demi keberlangsungan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menilai apakah pemerintah dapat menyelesaikan setiap kasus dan masalah yang kemungkinan dapat terjadi. Hal tersebut bisa menjadi ukuran apakah pemerintah sudah melaksanakan kegiatan dengan efektif, efisien, dan relevan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila semakin tinggi petugas pemerintahan dalam menyusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik untuk proses pengambilan keputusan maka tingkat terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin baik. Begitu juga sebaliknya semakin rendah petugas pemerintahan dalam menyusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan buruk untuk proses pengambilan keputusan maka tingkat terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin buruk.

Pada sistem pemerintahan, sebuah instansi pemerintah juga melaksanakan sistem pengendalian internal yang dimana hal ini menjadi kewajiban dan ketaatan suatu instansi atas kebijakan pemerintah. Peningkatan efisiensi terhadap anggaran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya akuntabilitas kinerja pada pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan indikator-indikator yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas instansi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Purbasari & Bawono (2017) dan Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

**H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

### **2.7.3. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Martinis dan Maisah (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan bawahannya agar mau melakukan tugas atau perintah sesuai dengan arahan pemimpinnya (Rizal & Hermanto, 2019). Pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi karena pemimpin merupakan titik



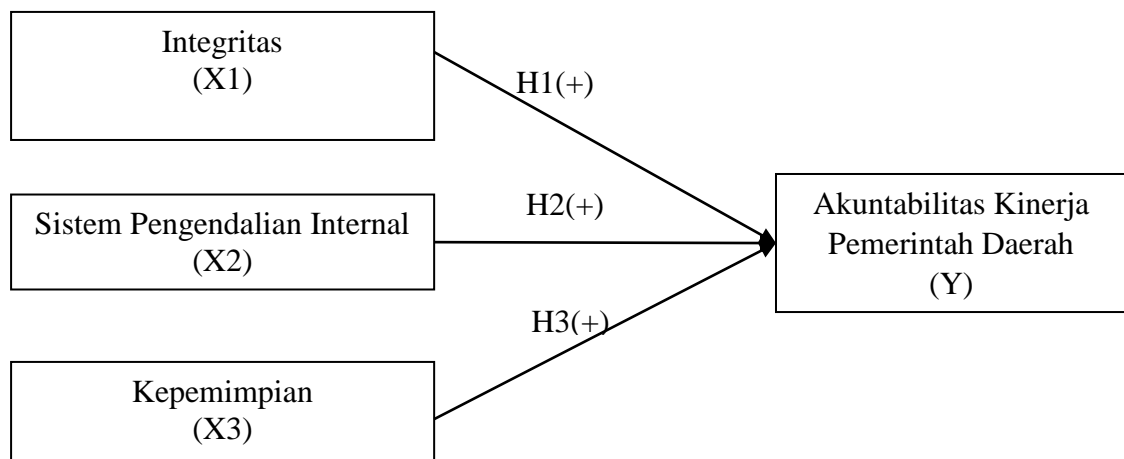
puncak dari suatu organisasi yang akan memotivasi dan mengarahkan bawahannya untuk sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah sebagai pihak yang diamanati untuk mengelola anggaran diharapkan bisa mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kepemimpinan yang baik dari kepala instansi maupun kepala bidang dalam instansi pemerintah, dapat mendorong pegawai dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Para pemimpin instansi dapat mengarahkan pegawainya untuk menjalankan organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, semakin baik kepemimpinan seseorang maka tentunya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah tersebut karena pegawainya akan melaksanakan kinerja serta pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya kecurangan.

Oleh karena itu, kepala instansi (pemimpin instansi) harus memiliki kepemimpinan yang baik sehingga dapat mempengaruhi semangat kerja yang baik kepada bawahan serta mendorong SKPD dalam penyusunan dan pelaporan LAKIP untuk mewujudkan suatu akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik (Claura, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Marlina et al., (2021) dan Claura (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

**H3 : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.**

## 2.8. Kerangka Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.8**  
**Kerangka Penelitian**

## **BAB 3**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi dalam penelitian ini meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 yang berjumlah 22 SKPD, khususnya bagian perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

#### **3.2. Sampel**

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria-kriteria sampel adalah sebagai berikut :

1. Pegawai SKPD yang bekerja di wilayah kabupaten Sukoharjo tahun 2022
2. Pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam penyajian dan pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi yaitu pegawai SKPD khususnya bagian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Hal ini dikarenakan.

#### **3.3. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian primer, sedangkan data yang digunakan adalah kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak Smart-PLS yang selanjutnya akan dianalisa. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada pegawai SKPD di Kabupaten Sukoharjo.

#### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

##### **3.4.1. Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y). Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Menurut (Ardiani, 2019), indikator akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terdiri dari 3 : Kejujuran dan Keterbukaan informasi , Kepatuhan Dalam Pelaporan dan Kesesuaian Prosedur

##### **3.4.2. Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah integritas, sistem pengendalian internal dan kepemimpinan.

###### **3.4.2.1. Integritas**

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, sehingga integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Ardiani, 2019).

Menurut Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019) indikator ada 5 item : kejujuran, keteguhan, memiliki Self-Control yang kuat dan Memiliki self-esteem yang tinggi

#### **3.4.2.2. Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019). Menurut (Tiasari, 2019) indikator SPI terdiri dari 5 item antara lain : Lingkungan Pengendalian , Penilaian Resiko , Kegiatan Pengendalian , Informasi dan Komunikasi , dan Pemantauan

#### **3.4.2.3. Kepemimpinan**

Menurut Marlina et al., (2021) pengertian kepemimpinan proses yang mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok agar upaya yang mereka tuju dapat tercapai. Menurut Sudyaini & Ria Sawitri. (2019) , indikator kepemimpinan terdapat 6 item yaitu Motivasi , Integrasi , Pertimbangan , Intelektual , kepercayaan , dan Apresiasi.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Menurut Sugiyono (2017), kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data primer dengan metode survei yang berbentuk seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk nantinya dijawab oleh responden. Kuesioner dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi dari responden misalnya opini, sikap, keinginan dan harapan dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk menunjukkan opini atau jawaban dalam kuesioner yang ada. Menurut Sugiyono (2017), skala likert dianggap sebagai skala yang mudah untuk digunakan dalam kuesioner penelitian. Jenis skala ini banyak digunakan oleh peneliti karena kemudahan dalam penggunaannya. Skala likert ini menggunakan beberapa butir pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberikan respon pada 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan tau pernyataan, yang biasanya terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Likert dalam Budiaji (2013)). Dalam kuesioner penelitian ini, peneliti menggunakan skala 1-5, dengan menggunakan sistem *favorable*, yaitu skala 1 (Sangat Tidak Setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Netral), skala 4 (Setuju) dan skala 5 (Sangat Setuju). Kemudian responden diminta untuk memberikan opini/pendapat pada setiap pernyataan yang tertera pada kuesioner dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom skala yang sesuai dengan pendapat responden.

#### **3.1 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan dua model pemodelan, yaitu analisa *outer model* untuk mengevaluasi model pengukuran dan memastikan bahwa *measurement* layak untuk dijadikan pengukuran, dan analisa *inner model* atau model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali & Latan, 2015). Aplikasi pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SmartPLS 3.

#### **3.5.1. Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan gambaran karakteristik atau fitur dari suatu data. Analisis Statistik Deskriptif menampilkan

informasi seperti nilai rata-rata (mean), median, mode, frekuensi, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel dalam set data baik dalam bentuk tabel maupun grafik (Ghozali & Latan, 2015). Untuk data berskala nominal, uji statistik yang digunakan adalah mode dan distribusi frekuensi.

### **3.5.2. Analisis Outer Model**

Dalam pengukuran outer model terdapat 3 macam uji yang dilakukan, yaitu :

#### **3.5.2.1. Uji *Convergent Validity***

Dalam penelitian ini, uji validitas konvergen digunakan untuk menguji ketepatan dan kecermatan data agar hasil penelitian tidak mengandung bias yang terbagi atas uji validitas konvergen dan uji diskriminan. Uji validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat *outer loading*, kriteria validitas konvergen yaitu nilai *loading factor* yang harus lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

#### **3.5.2.2. Uji *Discriminant Validity***

Uji validitas diskriminan diukur dengan membandingkan nilai *loading factor* dari satu konstruk dengan nilai *loading factor* dari konstruk lain. Nilai *loading factor* konstruk yang ditargetkan harus lebih besar daripada nilai *loading factor* konstruk lain dan dengan melihat nilai *square root AVE* yang disarankan yaitu lebih dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).

#### **3.5.2.3. Uji *Composite Reliability***

Sebuah konstruk mempunyai data yang dapat diandalkan atau *reliable* apabila memenuhi kriteria keandalan dari *composite reliability* >0,70. Nilai *composite reliability* 0,60 sampai 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian eksplorasi. Dapat diperkuat dengan nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai yang disarankan adalah lebih besar 0,6 (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.5.3. Analisis Inner Model**

Dalam pengukuran inner model terdapat 2 macam uji yang dilakukan, yaitu :

#### **3.5.3.1. Uji *Coefficient Determination (Adjusted R<sup>2</sup>)*,**

Uji *Coefficient Determination (Adjusted R<sup>2</sup>)* digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, dimana nilai 0,70 mengindikasikan bahwa model tersebut kuat, nilai 0,45 berarti model tersebut sedang atau cukup, dan nilai 0,25 menunjukkan model tersebut lemah (Ghozali & Latan, 2015).

#### **3.5.3.2. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Ghozali & Latan, 2015). Uji hipotesis dilihat melalui nilai *p-value*, pada tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 95%, sehingga tingkat ketelitian atau batas ketidaktepatan adalah  $(\alpha) = 5\% = 0,05$ , jadi :

Jika *p-value* lebih besar daripada  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Jika *p-value* lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.